BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Percepatan pertumbuhan ekonomi memang berperan sebagai syarat yang strategis bagi peningkatan kualitas kehidupan rakyat, namun pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika tidak ada aktivitas ekonomi dari masyarakat. Salah satu sektor yang berperan strategis untuk menggerakan perekonomian adalah sektor keuangan. Dinamika yang terjadi pada sektor keuangan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sistem keuangan dalam menjalankan fungsinya. Pada sistem tersebut terdapat pelaku, produk, kebijakan, dan mekanisme berlangsungnya sebuah kegiatan. Keberadaan sistem keuangan dalam ranah perekonomian nasional dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku ekonomi untuk dapat menjalankan transaksi ekonominya. Sistem keuangan pun dapat berperan sebagai tulang punggung perekonomian, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Untuk dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mampu memberantas kemiskinan, kontribusi sektor keuangan perlu dioptimalkan dengan membuka akses layanan jasa keuangan seluas mungkin kepada masyarakat.

Inklusi keuangan menjadi salah satu elemen dari pertumbuhan ekonomi yang menjadi ujung tombak pembangunan. Pentingnya pertumbuhan inklusi yang merujuk pada pemerataan dan penciptaan peluang yang sama untuk seluruh segmen kehidupan terlebih pada sosial ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan megurangi kemiskinan. Inklusi keuangan merupakan

ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Konsep inklusi keuangan saat ini telah menjadi pertanyaan terkait dengan isu panas tentang kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan. Penyebabnya adalah karena inklusi keuangan sudah terlihat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi untuk upaya mengentaskan kemiskinan, serta untuk upaya mengatasi ketimpangan atau kesenjangan yang secara signifikan meningkat di seluruh dunia. Tumbuhnya kesadaran bahwa pola pertumbuhan yang timpang memiliki batasan dan tidak berkelanjutan, karena terbatasnya permintaan aggregat. Konsekuensi sosial akan terjadi jika ketidaksetaraan ini tidak dapat ditolerir. Hal paling buruk yang bisa terjadi adalah kerusuhan sosial, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pentingnya penyusunan strategi keuangan inklusif dan strategi pembangunan ekonomi secara bersinergi dalam mengatasi ketimpangan secara lebih luas. Khususnya bagi negara berkembang, dalam upaya penanggulangan ketimpangan ekonomi, tidak hanya sekedar dengan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada kinerja industri nasional. Hal ini karena walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kerap tidak berkualitas. Oleh karena itu, dengan adanya inklusi keuangan dinilai dapat mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi bagi negara-negara berkembang dan adanya inklusi keuangan yang optimal, diharapkan mampu

mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Grafik 1.1 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2013-2019

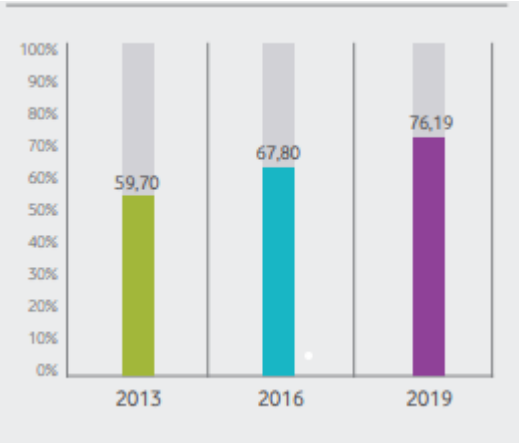

Sumber: OJK, 2019

Berdasarkan grafik diatas OJK melakukan pengukuran pada kondisi inklusi keuangan melalui SNLIK sejak tahun 2013 hingga 2019. Parameter penentu indeks inklusi keuangan adalah penggunaan produk dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan data, terjadi peningkatan indeks inklusi keuangan dari tahun ke tahun. Indeks inklusi keuangan tahun 2019 sebesar 76,19% artinya bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 76 orang yang inklusif atau mempunyai akses terhadap layanan jasa keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2014) tujuan utama dari inklusi keuangan adalah upaya mengurangi kemiskinan. Pentingnya inklusi keuangan ini dilihat dari fakta dimana tidak semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan disaat yang sama pula setiap

penduduk harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sistem keuangan yang ada. Oleh karenanya, hal yang terjadi adalah sistem keuangan hanya hidup dalam lingkungannya sendiri tanpa memberikan dampak yang nyata terhadap keberadaan sektor lain di luar sektor keuangan. Menurut Bintan (2015), pertumbuhan yang inklusif didasari oleh tiga komponen penting yaitu keberhasilan memaksimumkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan kerja. Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap pengentasan kemikinan telah dilakukan oleh Dixit dan Ghosh (2013) dimana hasilnya ialah penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, serta menciptakan mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya.

Upaya dalam mempercepat terciptanya inklusi keuangan yaitu dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, karena hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (2017) menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2013 adalah 21,8%. Kemudian pada survei tahun 2016 literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat sebesar 29,7%. apabila seseorang memahami tentang pengetahuan keuangan, maka akan

tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam produk serta layanan keuangan yang tersedia secara lebih efektif.

Grafik 1.2 Indeks Literasi Keuangan Tahun 2013-2019

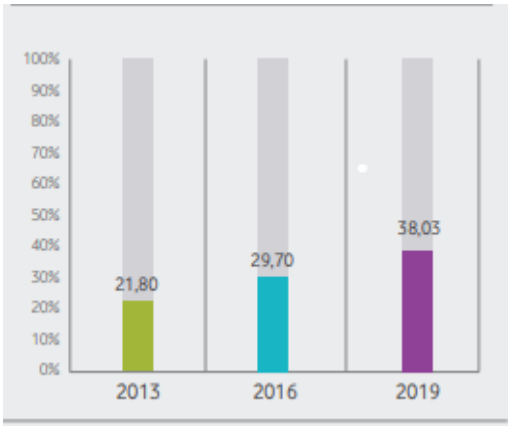

Sumber: OJK, 2019

Berdasarkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang well literate dari tahun ke tahun. Well literate merupakan kondisi dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Grafik 1.2 indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 38,03% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari survei sebelumnya yakni 29,7% di tahun 2016 dan 21,8% di tahun 2013. Meskipun menunjukkan peningkatan, di sisi lain data ini menunjukkan bahwa

masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang belum well literate. Bila merujuk pada data indeks literasi keuangan tahun 2019 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk, terdapat sekitar 62 orang yang belum memiliki pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang benar tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan jasa keuangan formal. Salah satu faktor penyebab rendahnya pengetahuan keuangan tersebut adalah kondisi geografis Indonesia yang pada umumnya sekitar 60% berada pada daerah perdesaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pulungan, D. R., dan Ndruru, A. (2019) Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa UMSU, artinya semakin baik tingkat literasi keuangan mahasiswa maka inklusi keuangan semakin meningkat dalam perkembangannnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019) menunjukan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan melalui financial technology. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan, semakin baik perilaku keuangan serta sikap keuangan seseorang akan meningkat pengunaan, pemanfaatan serta pemahaman produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa

keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain itu *financial technology* yang berkembang pada sektor keuangan menjadi instrumen penting dalam mempercepat inklusi keuangan sebagai salah satu program percepatan pembangunan. Efisiensi dan efektifitas yang didasarkan pada pemberlakuan fintech mengakibatkan pergeseran minat masyarakat pada sektor keuangan baik dalam proses pembayaran, investasi, menabung dan sebagainya. Kondisi tersebut secara langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Inovasi kebijakan inklusi keuangan merupakan paket kebijakan perbankan yang ditetapkan setelah terjadi krisis keuangan global. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2008) memaparkan pentingnya keuangan inklusif untuk mempercepat pembangunan terutama di sektor keuangan pada masyarakat miskin sehingga revolusi fintech ini sebagai penggerak pertumbuhan sektor keuangan.

Industri *Financial Technology* merupakan salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini dan teknologi dengan konsep digitalisasi pembayaran menjadi salah satu sektor dalam industri *Fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Dalam hal ini sektor *Fintech* paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses untuk dapat menggunakan layanan keuangan (Muzdalifa, Rahma dan Novalia, 2018) Bank Indonesia memberikan

definisi mengenai *Financial Technology*. yang diatur dan tertuang pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem pada bidang keuangan yang menghasilkan produk-produk layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada kondisi stabilitas moneter, stabilitas pada sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta kehandalan sistem pembayaran. Sedangkan menurut *Financial Stability Board* (Nizar, 2017) mendefinisikan *Fintech* sebagai suatu bentuk inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan jasa layanan leuangan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan.

Peran *fintech* untuk meningkatkan inklusi keuangan juga tercermin dalam beberapa karakter dasar *fintech* yang dapat dijabarkan sebagai berikut: pertama, meningkatkan akses dan desentralisasi sistem keuangan, dimana kemajuan teknologi yang digunakan memungkinkan inklusi baik komunitas individu maupun UMKM yang tidak bankable untuk dapat berperan sebagai penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan; kedua, meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor, dimana teknologi dapat menjadi penyedia transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan pembagian

informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta untuk saling bekerja sama; dan ketiga, biaya yang lebih rendah melalui peningkatan efisiensi, kecepatan dan otomatisasi. Karakter dari *fintech* inilah yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat terakses dengan layanan keuangan formal (Pratiwi, 2018).

Sektor *fintech* menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan *fintech* semakin diuntungkan dengan masifnya penggunaan *smartphone* oleh masyarakat, bahkan hingga daerah pedesaan, menjadi sarana penghubung dan solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal. Lewat penggunaan *smartphone*, masyarakat dapat menggunakan layanan finansial dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya atau menjaga keberlanjutan bisnisnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan imbas meluasnya dampak pandemi covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rizki Miftahur Rohmah, Tri Gunarsih (2021) *fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan artinya teknologi finansial berperan sebagai sarana yang membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara digital. Dengan adanya *fintech*, banyak masyarakat yang kini telah memiliki akun-akun layanan keuangan berbasis teknologi, semakin banyak masyarakat yang menggunakan *fintech*, maka semakin meningkat pula inklusi keuangan.

Grafik 1.3 Profil *Fintech* di Indonesia

Sumber: OJK 2017

Berdasarkan data grafik diatas sektor *payment* mendominasi pasar *fintech* dengan 42%, sektor *lending* 17%, sektor *aggregator* 12%, sektor *crowdfunding* 8%, sektor *personal financial planning* 8% dan sektor lain-lain 11%. Berkembangnya inovasi melalui *fintech* dapat meningkatkan inklusi keuangan karena banyak masyarakat yang memanfaatkan digital inovasi untuk memudahkan transaksi keuangan. Sebagai contoh *fintech lending* memberikan berkontribusi dalam membantu meningkatkan inklusi keuangan pada masyarakat, terutama dalam pertumbuhan kredit pada masyarakat unbanked.

Selain itu modal sosial sebagai percepatan dalam inklusi keuangan juga sangat penting, Modal sosial adalah kohesifitas antar individu sehingga terbentuk saling percaya (*mutualtrust*) diantara mereka (Tjahjono 2017). Selain itu Syafitri and Sudarwati (2015) modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat

yang memungkinkan terjalinnya kerjasama, diantara analisis dan kajian dari beberapa ahli juga menyimpulkan bahwa, modal sosial memiliki beberapa unsur pokok. Secara aplikatif, setiap masyarakat memiliki tingkat modal sosial yang berbeda beda, baik itu terkait kepercayaan, kerjasama, seperti kejujuran pemenuhan kewajiban, solidaritas, dan rasa keadilan berlaku. Kepercayaan adalah unsur penting dalam pembentukan modal sosial, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional. Hilangnya kepercayaan ini mengakibatkan banyak energi dan waktu terbuang untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Pembentukan modal sosial dan kepercayaan tidak terlepas dari permasalahan budaya. Semakin tinggi nilai modal sosial suatu masyarakat semakin tinggi pula tingkat kebudayaannya. Tersedianya modal sosial dengan fitur dan layanan keuangan yang canggih, maka akan memberikan kemudahan inklusi keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat (Wildan, 2019). Peran modal sosial dalam program Laku Pandai yang diciptakan oleh OJK merupakan beberapa contoh peran modal sosial yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya mengenai produk dan jasa keuangan. Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat semua orang dalam masyarakat atau sebagai sumber mendapatkan informasi, menjalin kerja sama dan sebagainya (Yanti, 2017).

Konsep modal sosial menarik perhatian para akademisi dan praktisi di dalam isu pembangunan. Modal sosial kemudian dianggap sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Posisi modal sosial menjadi penting untuk disorot mengingat paradigma pembangunan

yang diberlakukan tersebut lebih bersifat *bottom up* ketimbang *top down*. Modal sosial masuk dalam dimensi sosial dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencoba mengintegrasikan tiga dimensi: sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, posisi modal sosial juga berperan positif dalam dimensi politik karena mendorong partisipasi, aksesibilitas dan kebebasan masyarakat yang juga menjadi prinsip dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Sri Suryani dan Rani Israfiani (2021) Modal sosial berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat usia produktif di kecamatan Alas yang artinya hal ini berarti inklusi keuangan akan meningkat jika terdapat peran modal sosial yang di dapat oleh masyarakat Alas Kabupaten Sumbawa di usia produktifnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pulungan dan Ndruru (2019), bahwa modal sosial memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

Selanjutnya pendapatan juga turut andil dalam mempercepat inklusi keuangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli menyatakan “Pendapatan adalah sejumlah penghasilan atau gaji yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan atau usahanya (Isnandar, 2019). Apabila pendapatan seseorang tinggi, maka akan mendorong seseorang untuk mengelola keuangannya secara efektif dengan produk dan layanan keuangan yang tersedia (Nugroho & Purwanti, 2017).

Grafik 1.4 Persentase Pendapatan Berdasarkan Kelompok Ekonomi Penduduk Jakarta (September 2019-September 2020)

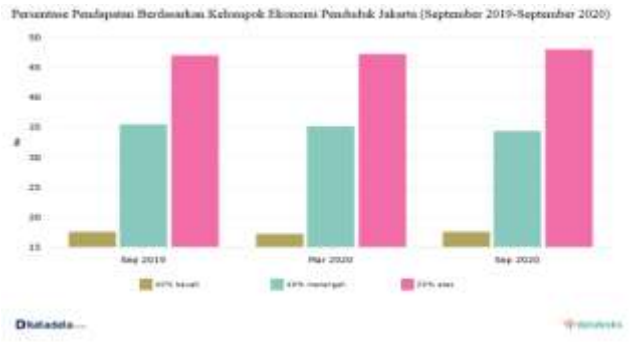

Sumber: Katadata, Februari 2021

Berdasarkan grafik diatas Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, proporsi jumlah pendapatan kelompok 20% ekonomi atas di Jakarta semakin meningkat. Persentasenya mencapai 48,05% pada September 2020, naik dari September 2019 yang sebesar 47,01% dan Maret 2020 yang 47,25%. Penurunan proporsi jumlah pendapatan tejadi pada kelompok 40% menengah dari 35,1% pada Maret 2020 menjadi 34,42% per September 2020. Sementara proporsi jumlah pendapatan kelompok 40% menengah ke bawah semakin meningkat dari 17,25% pada Maret 2020 menjadi 17,53% per September 2020. Proporsi jumlah pendapatan terhadap total penduduk dalam satu kelas ekonomi adalah indikator ketimpangan menurut Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, bila proporsi jumlah pendapatan kelompok ekonomi 40% terbawah di bawah 12%, maka ketimpangan pendapatan tinggi. Jika proporsinya antara 12-17%, maka masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang. Sementara, jika proporsinya lebih dari 17%, maka termasuk kategori ketimpangan pendapatan rendah. Oleh karena itu, dari

data mutakhir ini, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori rendah.

Pendapatan yang diterima seseorang, seharusnya berbanding lurus dengan perilaku keuangan orang tersebut. Seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi kemungkinan besar berperilaku keuangan yang baik, karena dana yang tersedia memberikan mereka kesempatan untuk bertindak lebih menggunakan layanan-layanan keuangan yang ada . Dalam penelitian Nugroho & Purwanti (2017) menemukan adanya pengaruh positif antara pendapatan dan inklusi keuangan, di mana saat seseorang memiliki pendapatan yang besar, maka akan diikuti dengan peningkatan inklusi keuangannya. Hal ini berarti dengan semakin tingginya pendapatan seseorang maka akan mudah dalam mendapatkan akses keuangannya. Sebaliknya, menurunnya tingkat pendapatan akan berdampak pada turunnya akses terhadap keuangannya.

Sampai saat ini berbagai macam studi empiris telah dilakukan para akademisi dan praktisi untuk menjelaskan pengaruh variable keperilakuan dan karakteristik individu terhadap inklusi keuangan. Berbagai studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang bervariasi dikarenakan terjadinya perbedaan dalam objek studi, periode penelitian, dan metode analisis yang digunakan para peneliti. Oleh karena itu studi lebih lanjut dengan objek studi, periode penelitian, dan metode analisis yang berbeda perlu dilakukan untuk menambah literatur mengenai inklusi keuangan. Adanya beberapa permasalahan inklusi keuangan di Indonesia, membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian serupa dengan kasus yang

berfokus pada DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul **"Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology*, Modal Sosial Dan Pendapatan Terhadap Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Di DKI Jakarta Serta Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam."**

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta?
2. Apakah *fintech* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta?
3. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta?
4. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta?
5. Aapakah literasi keuangan, *fintech*, modal sosial, dan pendapatan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta secara simultan?
6. Bagaimanakah literasi keuangan, *fintech*, modal sosial, dan pendapatan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta di tinjau dari sudut pandang islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh *fintech* terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, *fintech,* modal sosial, dan pendapatan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta secara simultan.
6. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, *fintech,* modal sosial, dan pendapatan terhadap inklusi keuangan pada masyarakat DKI Jakarta di tinjau dari sudut pandang islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi sumber referensi khususnya dibidang ilmu ekonomi dan keuangan dan memberikan informasi mengenai Inklusi Keuangan pada masyarakat di DKI Jakarta.

2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam kebijakan *financial inclusion.*